

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwasannya dunia teknologi informasi berkembang sangat cepat dan kompleks, terbukti dari banyaknya perangkat teknologi yang muncul sebagai sarana pendukung kehidupan masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, sosial, organisasi ataupun komersial. Perkembangan teknologi ini pula memungkinkan dan mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Indonesia haruslah mempunyai sistem informasi yang baik jika ingin tetap bersaing dengan negara lainnya. Sistem informasi perlu dikelola untuk menaikkan kualitas komunikasi pada organisasi, semakin tinggi kualitas komunikasi pada organisasi maka semakin baiklah integritas organisasi.

Semua pihak yang ikut serta dalam perkembangan sistem informasi saat ini tanpa terkecuali terus meningkatkan dan memperbaiki teknologi dalam memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat sebagai sarana pengambilan keputusan (Fahdiansyah dan Anas, 2017). Sehingga, dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut maka menyebabkan dibutuhkan penyesuaian juga pada sistem informasi akuntansi.

Bidang akuntansi juga tidak dapat dielakkan dari perkembangan teknologi sistem informasi. Sistem informasi pada akuntansi disebut dengan *Accounting Information System (AIS)*. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan komponen yang bekerja secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi akuntansi. Banyak sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang bertujuan

membantu akuntan menciptakan informasi yang andal, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dimengerti, dan diaudit. Sistem informasi berperan dalam bidang akuntansi karena disediakan. Sistem informasi pemerintah tidak terkecuali, dan kita perlu mendukung sistem informasi yang lebih baik agar informasi di bidang keuangan daerah yang dihasilkan benar dan selaras dengan yang diinginkan. Pemerintah Indonesia diam dan tidak nyaman mempergunakan sistem informasi akuntansi yang lama. Hal ini dikarenakan sistem perlu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan pengguna informasi ini.

Berlandaskan Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup serangkaian prosedur mulai dari pendataan, pencatatan, dan agregasi hingga penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bisa dilakukan secara manual maupun mempergunakan aplikasi komputer. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi/Pemerintah, yang dituangkan dalam justifikasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD bahwa setiap Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan serta hasil kegiatan Laporannya. Ketentuan ini tentunya memperjelas hierarki pelaporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, serta memaparkan pentingnya laporan laba rugi sebagai informasi yang melengkapi akuntabilitas keuangan pemerintah.

Sistem informasi pemerintahan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, sistem informasi yang baik dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar instansi/departemen untuk mencapai tujuan. Bila sistem informasi antar instansi/departemen tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi kegiatan yang tumpang tindih, bahkan bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk meninjau program dan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Beberapa fenomena terkait sistem informasi yang kurang berkualitas adalah: Abnur (2018) selaku Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa beberapa instansi kunci Pemerintah di Indonesia mempunyai sistem yang belum terhubung dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan lain. organisasi bahkan ketika mereka telah membentuk sistem informasi berbasis sistem. Suwono (2017) selaku Direktur BCA mengungkapkan bahwasannya perusahaan belum melaksanakan sistem tempat kerja yang fleksibel. Heru (2017) sebagai anggota Dewan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) mengatakan bahwasannya sistem informasi akuntansi pemerintah masih belum dapat diandalkan, sedangkan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah memerlukan sistem informasi akuntansi yang handal untuk mendukung akuntabilitas, fungsi manajemen dan pengawasan. Hasil observasi di Universitas Riau menunjukkan bahwasannya sistem informasi keuangan yang diberi nama SAIBA (Akuntansi Keagenan Berbasis Akumulasi) yang disediakan oleh Kementerian Keuangan berkualitas rendah sebab datanya tidak berkualitas tinggi, terintegrasi penuh. Berlandaskan fenomena dan pengamatan di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan,

beberapa lembaga negara dan perguruan tinggi negeri belum memenuhi standar sebab sistem belum terintegrasi, sistem tidak fleksibel dan sistem tidak dapat diandalkan.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan pada Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada institusi tersebut telah berbasis komputerisasi dan telah menggunakan aplikasi pada pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset/barang yang disebut "Simda".

Selanjutnya, terkait dengan kualitas dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada institusi tersebut masih belum dikatakan Andal, hal ini terindikasi dari masih ditemukannya operator pada OPD di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak berlatar belakang akuntansi, sehingga belum optimalnya pengimplementasian sistem informasi akuntansi (SIA) pada lingkungan OPD Kabupaten Aceh Tenggara sehingga berpotensi menurunkan kualitas SIA pada institusi tersebut.

Hal berikutnya yang terungkap adalah sistem informasi akuntansi dikabupaten aceh tenggara belum sepenuhnya efektif, dikarenakan aplikasi yang digunakan masih belum terintegrasi dan menampung sistem perencanaan pada lingkungan OPD Kabupaten Aceh Tenggara, Terutama yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK).

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu 1) pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran OPD belum tertib; 2) pengelolaan asset tetap belum sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah; 3) pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum optimal; 4) pembayaran tunjangan transportasi kepada

anggota DPRK tidak sesuai ketentuan; 5) kekurangan volume 20 paket pekerjaan pada enam SKPK dan denda keterlambatan belum dikenakan; 6) biaya perjalanan dinas luar daerah pada dua SKPK tidak sesuai ketentuan (LHP Laporan Keuangan Aceh Tenggara, 2019).

Berlandaskan pemaparan dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui tingkat kemahiran pengguna dan dampaknya terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, peneliti yang tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pengguna Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Serta Dampaknya Pada Kualitas Informasi Akuntansi Di Kabupaten Aceh Tenggara”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan konteks permasalahan di atas, maka identifikasi kemungkinan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Kualitas dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada Lingkungan OPD Kabupaten Aceh Tenggara masih belum dikatakan andal.
2. Sistem informasi akuntansi di kabupaten aceh tenggara belum sepenuhnya efektif, dikarenakan aplikasi yang digunakan masih belum terintegrasi dan menampung sistem perencanaan pada lingkungan OPD Kabupaten Aceh Tenggara
3. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Sistem Informasi Akuntansi di Kabupaten Aceh Tenggara yang berdampak pada kualitas informasi akuntansi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berlandaskan identifikasi permasalahan diatas, dan agar masalah yang diteliti tidak meluas, penelitian difokuskan pada pengujian pengaruh kompetensi pengguna dan pengaruh kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka bisa dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berdampak pada kualitas informasi akuntansi?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas Sistem Informasi Akuntansi di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk Mengetahui Dampak Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada kualitas informasi akuntansi di Kabupaten Aceh Tenggara.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi lebih banyak informasi sebagai konsep yang menetapkan kebijakan di Indonesia khususnya di bidang sistem informasi yang menggunakan karakteristik sistem informasi di pemerintahan di seluruh negeri.

2. Bagi peneliti, penelitian ini sebaiknya menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengaruh user power dan pengaruhnya terhadap kualitas sistem akuntansi.
3. Bagi pengelola, penelitian ini hendaknya memberikan informasi tentang kualitas informasi sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah, karena staf manajemen ingin menggunakan informasi sistem akuntansi tersebut.

